BAB III

Temuan – Temuan dan Analisis Data .

3.1 Tantangan – Tantangan Internal DPC Sampang .

3.1.1 Kurangnya Popularitas dan Ketokohan Pemimpin DPC Sampang .

Sesuai dengan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya , yakni menurut Rush dan Althoff mengemukakan bahwasanya salah satu hal yang menjadi dasar dari perekrutan kader partai politik adalah kondisi partai politik itu sendiri sebagai objek yang menyelenggarakan proses seleksi untuk mendapatkan sosok – sosok potensial untuk keberlangsungan kinerja maupun kepemimpinannya partainya . Dalam hal ini penulis menemukan sebuah fakta terkait kondisi pemimpin dari DPC Hanura Sampang itu sendiri . Pertama , dari sisi kepemimpinan DPC Hanura , dimana dalam hal ini Pemimpin DPC Sampang kurang memiliki popularitas , pengaruh , maupun figur di kalangan masyarakat setempat . Track Record pemimpin DPC Sampang adalah pensiunan birokrat yakni pada tepatnya adalah mantan Ketua Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan 1998 -2008 . Beliau bukanlah seseorang yang dapat dikatagorikan sebagai informal leader Madura seperti layaknya seorang Kyai atau Blater . Oleh karena itu , tidak banyak kalangan masyarakat Sampang yang mengerti tentang profil beliau , sehingga otomatis dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya pemimpin DPC Sampang bukanlah sosok yang populer dan ketokohannya juga belum dikenal luas di Kabupaten Sampang . Padahal menurut teori yang disampaikan oleh Richard Katz dan William Crotty , seorang pemimpin partai

politik maupun calon legislatif harus memiliki popularitas dan aksepbilitas di mata khalayak masyarakat . Akan tetapi , dalam hal ini pemimpin DPC Sampang tidak memiliki syarat – syarat tersebut . Pertama tidak dikenal luas masyarakat , dan yang kedua jikalau beliau tidak dikenal masyarakat luas , bagaimana mungkin masyarakat akan mengakui dan menerimanya sebagai sosok yang mampu menerima aspirasi – aspirasinya dan mampu mengemban sebagai wakil rakyat di kemudian hari . Dengan adanya permasalahan ini , tentu saja pada akhirnya Partai Hanura harus melaksanakan fungsi komunikasi politik dan sosialisasi politik kepada masyarakat Sampang yakni terkait dengan kewajiban untuk mengenalkan sekaligus mempromosikan baik figur pemimpin DPC -nya , produk partai politiknya , beserta dengan anggota – anggota yang selainnya agar masyarakat Sampang bersikap pro – aktif terhadap setiap kegiatan yang diadakan partai , termasuk kegiatan rekrutmen politik .

3.1.2 Kinerja Pengurus DPC Sampang yang Kurang maksimal

Sesuai dengan pernyataan dari Ramlan Surbakti , bahwasanya partai politik adalah organisasi yang berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Tidak berhenti pada aspek itu saja , partai politik juga memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah fungsi sosialisasi politik , komunikasi politik , dan rekrutment politik . Dalam hal ini DPC Hanura Sampang tidak melaksanakan kewajiban – kewajibannya tersebut secara berkelanjutan atau terus – menerus , dimana

pengurus – pengurus DPC Hanura baru memulai proses kaderisasi perempuan adalah ketika satu tahun menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014 , bukan dari sejak awal DPC Hanura Sampang didirikan di kota tersebut dan proses kaderisasi seharusnya berjalan setiap hari melalui program – program internal partai politik . Seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdul Maali (Ketua bidang Kaderisasi DPC Sampang).

," Iya sih mbak , kita memang baru mulai proses cari – cari calon legislatif perempuan itu sekitar satu tahun sebelum Pileg , mbak . Tapi itu juga ada alasannya mbak , pertama duitnya gak ada , kita gak ada Underbow , terus kita juga SDM-nya kurang banget sih "

Dari petikan argumen diatas kita bisa mengetahui bahwasanya DPC Hanura Sampang tidak melaksanakan fungsi sosialisasi politik , komunikasi politik , serta rekrutment politik secara terus menerus dan berkelanjutan , sehingga dalam hal ini kinerja pinternal DPC Hanura Sampang sendiri juga tidak maksimal . Selanjutnya , penulis juga ingin menambahkan bahwasanya dengan adanya sistem kinerja internal DPC Hanura Sampang yang kurang maksimal , maka bentuk partai yang dihasilkan-pun menjadi kurang jelas atau abu – abu . Dalam hal ini Partai Hnaura di Sampang tidak bisa dikatakan sebagai partai kader , partai massa , maupun partai berstandar ganda . Hal ini disebabkan oleh kegiatan kaderisasi hanya baru dilaksanakan satu tahun menjelang Pemilu Legislatif , sehingga dalam hal ini partai terkait dianggap sangat pragmatis dalam memenuhi kuota 30 persen perempuan.

3.1.3 Finansial Internal DPC yang Belum Kuat

Dalam hal ini DPC Sampang juga memiliki permasalahan pada kondisi finansialnya , apabila Richard Katz mengemukakan bahwasanya sebagai seorang calon legislatif perempuan harus memiliki kondisi finansial yang baik , apalagi organisasi partai politik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai macam fungsi politik di masyarakat . Tentu saja dana adalah aspek penting untuk mendukung keberlangsungan program – program internal partai baik untuk menjalankan fungsi komunikasi politik , sosialisasi politik , maupun rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini DPC Hanura Sampang memiliki kondisi tidak ideal yakni minimnya kucuran dana dari Dewan Pimpinan Provinsi Jawa Timur . Seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Moh. Marsuki ,MSi (Ketua DPC Sampang).

," Tapi iya kita ini juga tau diri lah mbak , kita ini partai baru , mana di Sampang ini kita juga belum ada prestasi . Pemilu 2014 ajah kita cuman dapat sedikit sekali , yah tapi maklumlah mbak wong partai masih baru . Oleh karena itu , pusat (DPP)gak bisa kasih dana banyak – banyak mbak ."

Kemudian dilanjutkan oleh pendapat dari Bapak Kuswanto H.Kuswanto, SH , MH ,MBA

,'' Memang yah mbak kita semua tau lah kalau mengkader orang itu butuh biaya . Apalagi kader perempuan , yang wilayahnya kayak Sampang, dimana cari kader wanita itu susah sekali . Kebutuhan lobi – lobi juga banyak . Tapi disisi lain mbak , kita ini Partai masih kecil . Kita tahap merintis , mbak , Jadi saya sebagai Pimpinan Hanura, Jawa Timur , saya mencoba untuk realistis . Dana kita sedikit , mbak . Untuk pembiayaan caleg Surabaya aja udah butuhnya banyak . Ini Surabaya lho mbak , yang sudah ada hasil . Oleh karena itu , saya juga gak bisa ngasih banyak – banyak ke daerah , mbak . Sebelum daerah itu membuktikan prestasinya .Kalau ada prestasi , pasti ada penghargaan juga. Jadi biarkan Sampang , berprestasi dulu lah . ''

Berdasarkan penjelasan narasumber di atas , dalam hal ini Pimpinan Hanura Jawa Timur juga menegaskan bahwa posisi Partai Hati Nurani Rakyat juga masih dalam tahap merintis , sehingga memang disadari bahwa kebutuhan dana dalam tahap merintis juga banyak , akan tetapi beliau juga menyadari dan mencoba realistis bahwa dana yang dimiliki juga sedikit sehingga beliau tidak bisa mengucurkan dana yang banyak pula ke daerah , serta beliau juga menunggu prestasi prestasi yang mampu digapai daerah untuk Hanura , setelah itu beliau menjanjikan akan adanya penghargaan setelah prestasi itu ada .

3.1.4 Belum Memiliki Underbow dan Jaringan – Jaringan Penggerak .

Underbow dan jaringan – jaringan penggerak adalah sumber basis massa dari sebuah Partai politik . Seperti yang telah diulas diatas , bahwasanya Partai politik harus menjalan berbagai fungsi – fungsi politik kepada khalayak masyarakat terutama dalam hal ini adalah fungsi sosialisasi politik , komunikasi politik dan rekrutment politik . Untuk menjalankan keseluruhan fungsi – fungsi tersebut tentu saja partai politik harus berhadapan dan berinteraksi dengan khalayak masyarakat agar terjadi hubungan timbal balik antara kedua belah pihak , dan pada akhirnya khalayak masyarakat bersedia untuk berpartisipasi dalam program – program kegiatan partai , termasuk dalam proses perekrutan calon legislatif perempuan . Jikalau basis massa yakni underbow dan jaringan – jaringan penggerak saja tidak punya , lantas bagaimana partai politik bisa terhubung dan menjalin kerjasama dengan masyarakat . Dalam hal ini penulis juga menemukan sebuah fakta , bahwasanya DPC Hanura belum memiliki Underbow dan Jaringan penggerak di Sampang , dalam artian DPC Hanura baru memulai mendirikan underbow tahun

2013 , yakni satu tahun sebelum pemilihan legislatif 2014. Hal ini dapat dibuktikan oleh pernyataan dari Bapak Abdul Maali (Ketua bidang Kaderisasi DPC Sampang).

,'' Underbow itu bisa dikatakan belum ada lah mbak . Jadi kita mengandalkan SRIKANDI –nya Hanura mbak yaitu program kewanitaannya hanura untuk menjaring ibu – ibu arisan ,ibu – ibu pengajian , ibu – ibu PKK itu mbak . Yah SRIKANDI-nya Sampang ini khan masih baru , masih kosong , jadi kita yah berusaha dari nol lah istilahnya .''

Dalam hal ini narasumber menyadari bahwasanya Partai Hanura adalah Partai yang mesin politiknya masih kecil , sehingga jaringan – jaringan underbow juga masih minim , bahkan masih merintis dari nol . Hanura memiliki underbow yang meliputi keorganisasian untuk kalangan perempuan yang bernama SRIKANDI . SRIKANDI memiliki program kewanitaan yang melebarkan sayapnya lewat kelompok ibu – ibu pengajian , PKK , dan kelompok arisan ibu – ibu . Akan tetapi keanggotaan SRIKANDI ini masih kosong , sehingga harus bekerja keras untuk mengisi keanggotaan SRIKANDI ini . Dengan hadirnya underbow SRIKANDI , diharapkan mampu menjaring kader perempuan yang bersedia untuk dijadikan calon legislative perempuan dari Partai Hanura.

3.1.5 Sumber Daya Manusia DPC yang M asih Terbatas .

Berdasarkan argumen yang diungkapkan oleh Rush dan Althoff yakni menururt Rush dan Althoff mengemukakan bahwasanya salah satu yang menjadi dasar dari perekrutan kader partai politik adalah kondisi subjek partai politik itu sendiri sebagai orang – orang sebagai sumber daya manusia internal partai politik

yang menyelenggarakan proses seleksi untuk mendapatkan sosok – sosok potensial untuk keberlangsungan kinerja maupun kepemimpinannya partainya (merekrut calon – calon legislatif perempuan). Jikalau dasar dari perekrutan politik saja sudah bermasalah , pasti proses perekrutannya sendiri juga akan bermasalah , atau bahkan tidak akan berjalan sama sekali . Dalam hal ini DPC Sampang memiliki Sumber Daya Manusia yang sangat terbatas , sehingga DPC Hanura Sampang tidak dapat melakukan proses Perekrutan Calon Legislatif Perempuan secara ideal . Hal ini dibuktikan dengan argumen dari salah satu narasumber yakni Bapak H. Moh. Marsuki , MSi

,'' Yang gerak ke bawah cari kader perempuan itu yah kita – kita ini sendiri , saya , pak abdul maali yang bagian kaderisasi , bendahara , sekretarisnya . Saya dan mereka ajak istri , anak , ponakan kita , pokoknya sanak saudara kita masing – masing- lah mbak untuk ngelobi sana – sini supaya dapat kader yang mau dijadikan caleg Sampang . Kita SDM-nya masih sedikit sekali , sehingga kita maksimalkan kepada pendekatan kepada keluarga masing – masing kader mbak.

Dilanjutkan dengan argumen dari Bapak Abdul Maali

," Soalnya , khan karena memang , caleg – caleg yang lalu yang kebanyakan orang eksternal itu semangatnya kalau waktu nyaleg aja mbak. Lha berhubung kemarin itu ,caleg perempuannya gak ada yang masuk dapat kursi , mereka jadinya males aktiv di Hanura lagi mbak . Apalagi kita minta tolong untuk jadi kader terus ngader lagi, mana mereka mau mbak .''

Dari pendapat narasumber di atas , sudah sangat jelas bahwasanya yang bergerak ke bawah mencari kader adalah kader kader lelakinya yang meliputi bendahara , sekretaris , petugas bagian kaderisasi serta ketua DPC-nya , dimana mereka mengajak anggota keluarga mereka untuk mendukung dan membantu Partai Hanura mensukseskan pemilu 2014. Dalam hal ini bisa kita ketahui bersama bahwasanya seharusnya partai politik sebagai sarana untuk sosialisasi

politik kepada masyarakat , dalam studi kasus partai Hanura ini tidak begitu berjalan dengan baik , hingga personil – personil Partai terkait tersebut menempuh cara – cara instan untuk mendapatkan kader – kader perempuan untuk dicalonkan sebagai caleg – caleg partai tanpa mempertimbangkan aspek aspek tujuan dari peraturan 30 persen kuota perempuan itu sendiri , yakni harus merekrut perempuan yang berkualitas agar dapat menyelesaikan problematika perempuan di parlemen . Serta penulis dalam hal ini juga ingin menambahkan bahwasanya seharusnya Partai Hati Nurani Rakyat sebagai sarana sosialisasi ke masyarakat harus mengadakan sosialisasi masyarakat mengenai betapa pentingnya perempuan dibutuhkan Parlemen untuk menyelesaikan segala persoalan gender di negeri ini. Selain itu terdapat alasan lain mengapa proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik , yakni karena banyak caleg -caleg perempuan Hanura tahun 2009 meninggalkan Partai Hanura , sehingga pengurus DPC sendiri lah yang harus turun ke lapangan mencari kader perempuan yang mau dicalonkan menjadi caleg perempuan dari Partai Hanura. Penulis berfikir bahwasanya hal ini tidak akan terjadi jikalau DPC Hanura Sampang senantiasa mengadakan proses kaderisasi secara berkelanjutan , sehingga Partai Hanura Sampang tidak menjadi sasaran orang – orang pragmatis yang hanya ingin menumpang nama mdan menumpang wadah untuk menjadi calon legislatif Perempuan untuk kepentingan yang semu . Pjikalau DPC Sampang melakukan fungsi sosialisasi politik dan rekrutment politik secara berkala , pasti akan bayak khalayak masyarakat yang akan meulai mengenal partai politik Hanura dan bersedia untuk bekerjasama untuk kesuksesan Pemilhan Umum Legislatif 2014.

3.2 Tantangan – tantangan dari eksternal Dewan Pimpinan Cabang Hanura , Sampang .

3.2.1 Adanya Presepsi Negative Tentang Makna Politik

Selain permasalahan – permasalahan internal yang dihadapi DPC Hanura Sampang yakni mengenai kondisi kinerja dan kepemimpinan yang kurang maksimal . Partai Hanura juga dihadapkan oleh kondisi sosio kultural Kabupaten Sampang , dimana kondisi – kondisi sosio kultur ini tidak mendukung pelaksanaan 30 persen kuota perempuan , yang akhirnya berdampak pada sulitnya mendapatkan perempuan Sampang untuk dicalonkan sebagai calon legislatif Perempuan dari Partai Hanura . Salah satunya adalah karena adanya presepsi Negative tentang makna politik di benak khalayak masyarakat Sampang . Dimana politik selalu diindetikan dengan hal – hal buruk seperti koruptor , pembohong , kejam , dan lain sebagainya . Dengan adanya presepsi negative tersebut , jikalau terdapat perempuan Sampang yang berkecimpung di dunia politik (termasuk menjadi calon legislatif dari partai tertentu) , niscaya perempuan tersebut akan mendapatkan stigma negative dari khalayak masyarakat . Hal ini diperkuat dengan pernyataan Hj.Siti Rofiah yakni calon legislative perempuan Daerah Pilih Sampang 4 :

" Saya ini sempet jadi buah bibir di Kampung mbak .Sebagai caleg saya juga harus promosiin diri saya , supaya dipilih ke tetangga – tetangga , kampung sebelah , juga saya khan harus rapat sama pengurus lain , diklat caleg segala macem . Saya ini digosipin yang wanita gak bener , mentelantarkan anak dan suami lah khan soalnya saya pulang malem – malem mbak kalau habis Rapat itu . Padahal saya ini khan pulang malem – malem khan tujuannya baik , bukan selingkuh , atau ingin berbuat nakal . ‘’

Hal ini adalah pengakuan yang diutarakan oleh salah satu calon legislative perempuan Sampang , dimana beliau menceritakan perjuangannya selama menjadi calon legislative , dimana harus sering bertengkar dengan suaminya , ditambah lagi dengan menjadi buah bibir di kampungnya . Dari uraian diatas beliau menggambarkan bagaimana sibuknya , menjadi caleg perempuan dari Partai Hanura mulai dari harus mengikuti rapat , sosialisasi , sampai harus pulang larut malam apalagi hingga menjadi buah bibir para tetangganya yang mengatakan bahwa beliau bukan wanita baik baik . Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya seharusnya dengan adanya kondisi sosio kultural yang tidak mendukung keberlangsungan misi 30 persen perempuan yang notabene adalah wajib dipenuhi oleh setiap partai politik , seharusnya DPC Sampang menjalankan fungsi sosialisasi politiknya secara berkala yang menjelaskan atau mensosialisasikan kepada khalayak masyarakat Sampang , bahwasanya politik adalah bagian vital dari pembanguan suatu negara ke arah yang lebih baik di masa depan , sehingga masyarakat tidak hanya menilai dunia politik dari satu prespective saja , yakni hanya prespective kriminalnya atau kesalahan para politikus – politikusnya saja . Akan tetapi justru dengan adanya hal – hal buruk tersebut Partai Hanura harus bisa memotivasi masyarakat Sampamng terutama kalangan perempuan Sampang untuk menghiasi dunia perpolitikan dengan hal – hal yang baik dari hari ke hari lewat proses partisipasi politik melalui suatu partai politik , termasuk menjadi calon legislatif perempuan yang nantinya akan menyelesaikan segala persoalan perempuan Sampang serta meningkatkan taraf hidup perempuan Sampang .

3.2.2 Dominasi lelaki dan Kyaisme yang Masih Kuat .

Dalam hal ini dominasi kaum lelaki , terutama para Kyai di Kabupaten Sampang memang sangat tinggi . Dengan adanya dominasi lelaki yang tinggi maka kaum perempuan menjadi tidak bebas melakukan kegiatan – kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Sementara seperti yang sudah diungkapkan oleh Richard Katz dan William Crotty dimana seorang calon legislatif perempuan dituntut untuk senantiasa mengerti permasalahan – permasalahan masyarakat yang diwakilinya , memperhatikan aspirasi – aspirasi masyarakat sampai merumuskan aspirasi – aspirasi tersebut , mengkomunikasikan kembali kepada khalayak masyarakat yang nantinya akan dianilisis dan ditemukan solusi – solusinya . Serta seorang calon legislatif juga harus diterima oleh masyarakatnya sebagai sosok yang akan mewakilinya dan memecahkan segala permasalahan masyarakat . Dengan kriteria – kriteria tersebut , maka seorang calon legislatif senantiasa dituntut untuk bergerak aktiv dan membaur dengan masyarakatnya , dan pastinya akan menuntut banyaknya aktivitas di luar rumah , dimana dalam hal ini akan sangat susah untuk dilakukan apabila kaum lelaki baik yang statusnya sebagai suami maupun guru agama (kyai) justru tidak mendukung para kaum perempuannya untuk memiliki kualifikasi – kualifikasi tersebut . Hal ini disebabkan oleh mayoritas kaum lelaki , termasuk para Kyai tidak memperbolehkan wanita berkecimpung di dunia politik , dan menganggap bahwasanya tugas wanita adalah mengurus suami dan mendidik anak . Sedangkan dunia politik hanya diperbolehkan untuk kaum lelaki , karena gender lelaki dinilai sebagai gender yang lebih kuat dan lebih pantas untuk berkecimpung di dunia

politik yang kejam . Hal ini diperkuat dengan argumen dari Siti Mutamanah yakni calon legislative perempuan Daerah Pilih Sampang 3 .

" Saya juga sempet itu mbak 3 bulan berturut – turut suka berantem sama suami saya , soalnya saya sibuk di Partai supaya dapat suara pas pemilu Gak hanya sama suami , dan bapaknya saja mbak , kalau udah dibilang sama Kyai atau guru ngajinya politik itu kotor , jangan ikut – ikut politik , apalagi perempuan. Perempuan iku wes cukup masak , macak lan manak . Perempuan yang ikut politik itu ya perempuan gak bener , perempuan durhaka , bukannya mengabdikan hidupnya untuk keluarganya , eh malah ikut – ikut pergaulan politik kekuasaan yang banyak nggak nggenahnya itu. Biasanya ya mbak kalau ada calon legislative perempuan yang mau sosialisasi atau istilahnya sowan ke rumah Kyai yang berpengaruh gitu , sama Kyai-nya dibilang perempuan gak bener mbak . ‘’

Dari keterangan nara sumber di atas terdapat dua hal yang bisa diamati yakni pertama sudah lelaki sangat kuat dikarenakan oleh pemahaman ajaran agama yang masih sangat konservatif diantaranya menganggap bahwasanya perempuan tidak pantas untuk dijadikan pemimpin , perempuan hanya bertugas untuk mengurus suami dan anak , perempuan harus patuh kepada suaminya . Yang kedua adalah adanya paham Kyaisme dimana kyai memiliki power yang sangat kuat (hingga informan eksplisit menyebutkan bahwasanya perkataan kyai itu seperti perkataan tuhan yang diikuti khalayak masyarakat)dan kyai juga menduduki posisi – posisi strategis informal leader sebagai ketua pengajian mulai dari kalangan kanak – kanak hingga dewasa , sehingga kyai menjadi prioritas opini di dalam kehidupan sehari hari dan posisinya sangat disegani dan segala ucapannya akan dianggap benar dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari . Oleh sebab itu perempuan menurut tunduk kepada laki – laki akibat pemahaman agama yang konservatif , kemudian membuahkan pada ketundukan tersendiri kepada kyai sebagai pemuka agama dalam kehidupan sehari hari . Ditambah lagi

Kyai berpendapat bahwasanya perempuan tidak pantas untuk dunia politik dan perempuan yang ikut dunia politik adalah perempuan yang tidak baik . Sehingga dengan fatwah dan perkataan – perkataan kyai yang seperti itu , maka sangat mempengaruhi opini masyarakat setempat yang akan menganggap jikalau ada perempuan yang berkecimpung di dunia politik , maka perempuan tersebut juga dianggap perempuan tidak wajar .

Selanjutnya penulis juga ingin menambahkan , bahwasanya adanya faham macak , masak , dan manak. Macak adalah berdandan agar tampak cantik dan menawan yang tujuannya untuk mencari suami , dan pendidikan tinggi tidak terlalu diprioritaskan . Kedua , masak adalah ketrampilan untuk mengolah bahan bahan makanan untuk menjadi makanan yang sedap untuk keluarganya . Dan yang ketiga adalah manak , yaitu bereproduksi atau melahirkan anak , menghasilkan keturunan untuk kelanjutan keluarganya . Sehingga kesimpulannya perempuan itu fokus untuk intern keluarga yakni mengurus suami suami dan membesarkan anak saja , tidak go public apalagi terjun ke dunia politik . Dan pemahaman ini sudah sangat berbeda dengan masyarakat di Surabaya dimana kaum perempuannya bisa go public .

3.2.3 Tingkat Pendidikan Perempuan dalam Konstruksi Sosial

Seperti yang dikemukakan oleh Richard Kartz mengenai kriteria – kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon legislatif dimana salah satunya adalah latar belakang pendidikan dan level pendidikan yang baik ,setidaknya adalah lulusan sarjana . Diharapkan dengan latar pendidikan lulusan sarjana , maka calon

legislatif tersebut memiliki kemampuan merumuskan dan analisis permasalahan masyarakat . Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwasanya sebagian besar perempuan Sampang tidak melanjutkan pendidikannya hingga jenjang sarjana . Seringkali yang terjadi disini adalah setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama , mayoritas dari perempuan Sampang menikah dan fokus mengurus keluarganya . Dengan adanya situasi seperti ini , tentu saja sangat sulit bagi DPC Hanura Sampang untuk mendapatkan perempuan – perempuan Sampang yang memenuhi kriteria yang ideal (secara pendidikan)untuk menjadi calon legislatif yang berkualitas untuk mewakili Partai Hanura. Seperti yang telah diutarakan oleh Drs . H . Moh . Marsuki , MSi .

,'' Disini itu mbak tugas perempuan adalah masak , macak , manak . Yah jadi boro – boro mbak untuk pendidikan . Disini itu yah , yang lulusan SMA ajah itu gak banyak kok , apalagi yang S1 , wah sedikit sekali mbak . Habis lulus SD, SMP githu yah ,langsung nikah punya anak , nurut suami . Jadi bisa baca tulis itu yah sudah cukup lah . Gak perlu sampe yang kritis , apalagi ikut – ikut politik, mbak . Kita biasanya dapat yang sarjana itu dari kalangan – kalangan yang berpengaruh mbak , kayak anaknya Kyai , Lurah , anaknya PNS , anaknya guru . "

Dalam hal ini terdapat sebuah realitas yang menunjukkan adanya relaitas rendahnya tingkat pendidikan bagi kaum wanita , Sampang .Seperti yang sudah diungkapkan oleh narasumber di atas bahwasanya pendidikan bukanlah suatu hal yang diprioritaskan disana .Mayoritas kaum wanita menikah setlah lulus dari Sekolah Menengah Pertama . Serta kebanyakan wanita yang mengantongi ijazah SMA-pun juga masih harus diberikan pembinaan ekstra mengenai dunia perpolitikan , karena tidak jarang pula wanita berpendidikan akhir Sekolah Menengah Atas yang masih saja beranggapan bahwa politik itu kotor dan tidak layak untuk diikuti . Yang kedua adalah memang masih ada wanita sarjana disana

, hanya saja sangat kecil . Mereka berasal dari keluarga keluarga terpandang dan berpengaruh seperti guru , PNS , anak kyai , dan anak lurah .

3.2.4 Finansial Perempuan Sampang yang Lemah

Seperti yang dikemukakan oleh Richard Kartz mengenai kriteria – kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon legislatif dimana salah satunya adalah memiliki finansial yang kuat . Hal ini diharapkan agar calon – calon legistalif tersebut dapat menanggung segala kebutuhan kampanyenya . Akan tetapi kaum perempuan di Kabupaten Sampang mayoritas adalah bukan wanita karir atau lebih tepatnya adalah hanya seorang rumah tangga yang keuangannya tergantung sepenuhnya dari suami . Ketika perempuan hanya menggantungkan finansialnya kepada suaminya saja , maka akan sangat sulit sekali jikalau perempuan tersebut harus menjadi calon legislatif , otomatis akan membutuhkan dana yang tidak sedikit . Sementara kebutuhan keluarga juga harus dipenuhi setiap hari , dan sumber keuangan hanya dari suami . Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu caleg perempuan Hanura yakni ibu Musrifah , Calon legislative perempuan Daerah Pemelihan Sampang 5.

" Di sini khan memang mayoritas kebanyakan ibu rumah tangga mbak , termasuk saya . Jadi apa – apa yang apa kata suami , mbak . Wong gak ada pegangan penghasilan sendiri . Caleg kita itu kebanyakan ibu rumah tangga mbak . Yang penting pokonya , gak buta angka , bisa baca tulis . Pokoknya mau dulu mbak , itu modal awal . Setelah itu kalau masalah financial kita coba usahakan lah , kalau dia gak mampu . Itupun juga pas- pasan . Dapat yang mau , yang percaya diri , tahan banting omongan orang aja masih susah , mbak . ‘’

Hal ini merupakan pengakuan dari narasumber dimana dalam hal ini beliau mengutarakan bahwa mayoritas perempuan Sampang adalah ibu rumah tangga ,

sehingga keuangannya semua tergantung pada suaminya . Begitupula dengan caleg – caleg perempuan yang dimiliki Partai Hanura ,mayoritas dari calon – calon legislatif perempuan Hanura adalah ibu rumah tangga yang seluruh keuangannya bergantung kepada suaminya . Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya jikalau Partai Hanura menjalankan fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik secara berkala dan berkelanjutan , maka persoalan mengenai finansial perempuan Sampang akan dapat diatasi . Apabila DPC Hanura melakukan proses perekrutan sejak awal pendirian DPC Sampang , maka internal partai bisa memberlakukan sistem kas partai , dimana kas DPC ini adalah hasil uang iuran bulanan maupun tahunan dari seluruh kader perempuan Hanura sebagai tabungan jangka panjang sebagai persiapan dana atau cadangan dana kampanye caleg – caleg perempuan DPC Sampang pada moment Pemilihan Umum Legislatif .

3.3 Sistem Kaderisasi Calon Legislatif perempuan yang dilakukan DPC Hanura, Sampang.

Berdasarkan pengertian kader itu sendiri yakni orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan , partai , dan sebagainya serta orang yang diharapkan mampu memangku jabatan di kemudian hari . Sedangkan pengertian kaderisasi adalah proses pengkaderan serta proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik seorang calon anggota organisasi agar dapat diterima menjadi anggota organisasi sengan cara sistematis dan terencana dengan tujuan agar organisasi

memiliki anggota yang memahami visi , misi , serta mampu menjalankan program organisasi .

Sesuai dengan data – data yang didapat , penulis bisa menyimpulkan bahwasanya Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Sampang sebenarnya tidak melakukan proses kaderisasi calon legislatif perempuan sama sekali . Tetapi hanya sebatas mencari perempuan – perempuan Sampang yang bersedia untuk dijadikan sebagai calon legsilatif perempuan . Hal ini terjadi karena pada kenyataanya DPC Hanura Sampang tidak memiliki program – program internal partai tertentu untuk melaksanakan fungsi rekrutment politik , seperti seleksi calon kader atau seleksi calon pengurus DPC Hanura maupun seleksi Calon legislatif perempuan Hanura . Akan tetapi hal – hal yang terjadi adalah Partai Hanura hanya mencari kader kader perempuan secara pragmatis dan sifatnya transaksional yakni hanya dilakukan menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014, bukan sebagai sistem rekrutmen yang berkelanjutan dari waktu ke waktu.

3.4 Upaya – Upaya Penjaringan Calon Legislatif Perempuan.

3.4.1 Pemberian Kelonggaran dan Kemudahan untuk menjadi anggota Partai.

Sesuai dengan informasi dari narasumber di atas , bisa diketahui bahwasanya Partai Hati Nurani Rakyat telah memberikan fasilitas – fasilitas kemudahan untuk bergabung menjadi calon legislative perempuannya , yakni pertama adanya pembebasan biaya bagi pendaftar caleg perempuan . Yang kedua adalah setelah dibebaskan biaya untuk menjadi calon legislative perempuannya , partai Hanura

juga masih memberikan pembinaan berupa pengetahuan untuk berpolitik , pengetahuan pembekalan menjadi calon legislative , serta ditambah lagi dengan bantuan – bantuan untuk mensukseskan calon – calon legislative perempuan saat pemilihan umum calon legislative 2014. Serta perlu ditambahkan bahwasanya dalam hal ini Partai Hanura juga tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan atau kriteria yang berlebihan secara kualitas berpolitik untuk caleg perempuannya , cukup dengan asalkan perempuan itu bersedia , berminat untuk menjadi caleg perempuan Hanura.

3.4.2 Melobi Para Informal Leader di Kabupaten Sampang .

Dalam hal ini, terdapat pembagian tugas antara ketua DPC Sampang dan sub organisasi bagian kaderisasi yakni dalam hal ini diketuai oleh Pak Abdul Maali . Disini para pengurus DPC Hanura sub bagian kaderisasi melakukan upaya lobi – lobi kepada tokoh tokoh masyarakat yang dikenal dengan istilah belateran . Belateran adalah salah satu informal leader setelah kyai , yang berbeda adalah kyai memiliki kultur keagamaan yang sangat kental . Sedangkan blater memiliki kultur diluar kultur kyai , blater lebih dikenal dengan sebutan para jagoan – jagoan . Dengan kata lain Blater memiliki pengaruh yang cukup besar dan disegani oleh masyarakat. Yang disebut blateran adalah sesepuh kampung , orang pintar yakni (orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih yakni terutama pada bidang supra natural), mantan birokrat (PNS ,guru tentara , dan lain – lain) , serta pendatang yang sukses menjadi orang kaya di Sampang . Sementara Ketua DPC Sampang melobi informal leader yang fokus di bidang

keagamaan yakni para Kyai , yang kedua adalah sub bagian kaderisasi melobi informal leader di bidang sosial kemasyarakatan atau para jagoan – jagoannya , yakni para blateran . Serta mereka memulai aktivitas lobi – lobi baru awal tahun 2013.

Target dan Tujuan Lobi – Lobi :

Target utamanya adalah sebenarnya untuk mendapatkan calon legislatif perempuan dari para kyai tersebut yang notabene memiliki pengaruh di pondok – pondok pesantrennya, maupun dari keluarga para blater . Dengan itu , maka Partai Hanura tidak lagi bersusah payah untuk mengusahakan kemenangannya di pileg 2014 , karena mereka sudah memiliki banyak massa dan pengaruh di Sampang . Jikalau target utamanya tak terpenuhi karena berbagai alasan seperti mungkin kyai tersebut sudah memihak ataupun terlibat perjanjian dengan partai politik lain , maka setidaknya tokoh tokoh agamanya tersebut bersedia membagi sebagian suara massanya untuk dikerahkan pada Partai Hati Nurani Rakyat .

3.4.3 Pemberian Bantuan – Bantuan Biaya kepada Kelompok – Kelompok Sosial.

Untuk mensukseskan dan melancarkan lobi – lobinya Partai Hanura juga melalukan upaya – upaya yakni dengan memberi bantuan – bantuan kepada objek lobi – lobinya . Bantuan – bantuan tersebut disalurkan langsung dari ketua DPC Sampang yakni Bapak Marsuki ke pondok – pondok pesantren berupa kerudung gratis , buku alat tulis gratis , perjalanan ziarah wali limo gratis untuk ibu – ibu

pengajian , serta pemberian bantuan pengobatan gratis di Posyandu . Sementara dari group kaderisasi sendiri memberikan bantuan – bantuan kepada warga – warga kampung berupa pemberian kerudung gratis , makanan gratis untuk pengajian – pengajian kampung , pemberian makanan gratis untuk acara hajat warga seperti bancaan orang meninggal di kampung – kampung . Dalam hal ini penulis berfikir bahwasanya praktek – praktek yang dilakukan sangatlah pragmatis dan transaksional , dimana justru praktek – praktek seperti ini justru bertolak belakang dengan cita – cita mulia kuota 30 persen perempuan , dimana seharusnya partai Hanura sebagai partai politik mampu mencari dan mencetak kader – kader perempuan yang berkualitas untuk dicalonkan sebagai calon legislatif perempuan yang nantinya akan dapat menyelesaikan segala problematika perempuan di ranah pemerintahan sebagai upaya perwujudan dan dukungan dari cita – cita 30 persen kuota perempuan , akan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya , Partai hanya sekedar mencari kader perempuan hanya sebagai gugur kewajiban sebagai partai politik .

3.4.4 Melobi Internal Keluarga Pengurus Lelaki DPC .

Selain melakukan usaha – usaha lobi – lobi di luar Partai , ternyata dari pihak internal DPC Hanura Sampang juga melakukan lobi – lobi di internal keluarga untuk mendapatkan calon legislative perempuan , dengan cara melobi istri istri ataupun sanak saudara pengurus laki – laki Partai Hati Nurani Rakyat sendiri . Meskipun partai menjalankan upaya – upaya tersebut , akan tetapi Partai Hanura tetap memberikan pembekalan dan bimbingan – bimbingan agar caleg –

caleg perempuan yang didapat dari internal keluarga para pengurus juga tetap berkualitas diantaranya dengan memberikan pembekalan yang meliputi rapat bersama di kota Surabaya dengan menghadirkan dosen Politik dari Universitas Airlangga yang memberikan pengetahuan tentang dunia perpolitikan , mekanisme - mekanisme Pemilihan Umum , serta mekanisme aturan bagaimana menjadi Calon legislative yang baik , bagaimana upaya – upaya yang harus dilakukan untuk memenangkan Pemilu Legislative 2014. Tidak hanya berhenti dari situ saja , DPC Hanura, Sampang juga masih mengadakan Rapat Internal Daerah Pilih untuk menanamkan kesolidan antar caleg .Tetapi apakah dengan mengadakan segala pembekalan – pembekalan serta rapat – rapat internal , lantas menjadikan calon – calon perempuan yang diajukan sebagai caleg mampu menjadi representator perempuan yang handal . Sementara pembekalan – pembekalan tersebut dilakukan menjelang Pileg , bukan sifatnya pembekalan – pembekalan yang sifatnya berkelanjutan atau continuitas yang memang dilaksanakan secara rutin atau reguler setiap bulan atau setiap tahun.

Dalam hal ini , penulis bisa menggambarkan bahwasanya memang cara – cara yang ditempuh Partai Hati Nurani Rakyat sangatlah instan , yakni hanya untuk memenuhi angka kuota 30 persen perempuan semata , sebagai bentuk simbol perwakilan yang dimiliki partai terkait . Yang kedua adalah adanya pembekalan – pembekalan dan rapat – rapat internal hanyalah cara yang instan pula sebagai sarana sosialisasi politik , dimana seharusnya partai tidak hanya melakukan sosialisasi – sosialisasi tersebut hanya pada saat moment pemilu tetapi seharusnya sosialisasi politik dilakukan keberlanjutan agar kader – kader perempuan yang

dicalonkan sebagai calon legislative pada saat pilihan legislatif bukan kader – kader perempuan yang kurang mumpuni , bahkan jauh dari kualitas yang diharapkan oleh cita cita kesetaraan gender yang tercermin dari peraturan kuota 30 persen perempuan itu sendiri . Selain itu narasumber juga menuturkan sebagian calon - calon legislatif yang berasal dari salah satu keluarga pengurus laki – laki DPC Sampang seperti Ibu Heny Widiastuti , ST yang merupakan anak dari Wakil ketua , disusul oleh Ibu Aisyatur Rodiyah dari Dapil Sampang 2 yang merupakan istri dari salah satu sekretaris DPC Hanura Sampang. .